



Strategi Bakamla RI Dalam Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara

Zidan Patrio

Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin
patrioz20e@student.unhas.ac.id

Kata kunci:	Abstrak
Bakamla, Keamanan Laut, Laut Natuna Utara	Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau dan memiliki banyak kekayaan alam laut. Wilayah Laut Natuna Utara salah satunya yang memiliki kekayaan laut terbesar dengan sektor perikanan dengan potensi mencapai 767.126 ton. Kekayaan yang dimiliki bahkan seringkali memicu ketegangan di wilayah Laut Natuna Utara. Pada 2021 lalu misalnya, ketika China melakukan protes kepada Indonesia karena melakukan pengeboran di rig lepas pantai Natuna Utara. Karena alasan semacam itu dibentuklah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) pada 2014 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Dalam tulisan ini, akan dipaparkan lebih jauh mengenai strategi Bakamla dalam mengawasi dan mempertahankan kedaulatan Indonesia dari aktivitas ilegal negara asing di Laut Natuna Utara seperti <i>illegal fishing</i> dan pelanggaran perbatasan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, di mana data diperoleh dengan studi literatur dari sumber-sumber sekunder seperti laporan instansi terkait, artikel, buku, dan dokumen lain yang relevan dengan kasus yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan Bakamla dalam menjaga keamanan dan kedaulatan di Laut Natuna Utara ada tiga, yakni: (1) Peningkatan kapasitas SDM dan peralatan Bakamla; (2) Perlibatan instansi lainnya; dan (3) Pengerahan partisipasi masyarakat secara langsung.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan (*Archipelagic state*) terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau. Dari luas wilayah keseluruhan mencapai 7,81 juta kilometer persegi, sekitar 75 persen di antaranya merupakan wilayah laut (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020). Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat besar. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), potensi kekayaan alam laut Indonesia dari berbagai sektor, nilainya hampir mencapai 20 ribu triliun rupiah per tahun (Bisnis.com, 2020). Kawasan perairan Natuna Utara merupakan salah satu wilayah yang menjadi penyumbang kekayaan besar itu dengan potensi perikanan mencapai 767.126 ton (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2022). Laut Natuna utara masuk dalam 200 mil wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dimiliki Indonesia secara sah di bawah ketentuan Konvensi UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea).

Perairan Natuna juga menyimpan potensi kekayaan mineral yang cukup besar dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Merujuk pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), blok East Natuna menyimpan kandungan gas dengan volume yang cukup besar yakni 222 triliun kaki kubik (TCF). Meski demikian, yang benar-benar berhasil

dieksplorasi baru mencapai 46 TCF (GNFI, 2021). Bukan hanya gas, Natuna juga memiliki kandungan minyak bumi yang mencapai 14.386.470 barel (Miranda, 2018). Dari segi geografisnya, letak Laut Natuna utara yang berada di jalur pelayaran Internasional membuat wilayah perairan ini menjadi sangat potensial dalam sektor perdagangan lintas laut. Jalur ini bahkan disebut menjadi salah satu rute utama dari sepertiga jalur pelayaran internasional (GNFI, 2021). Posisi perairan Natuna secara geografis dianggap strategis karena menghubungkan wilayah Timur dan Barat dunia.

Dengan potensi yang begitu besarnya yang dimiliki oleh perairan Natuna Utara, wilayah ini terkadang menjadi sumber konflik dari perbedaan kepentingan antarnegara. Pada akhir 2021 lalu misalnya, media pemberitaan Internasional Reuters (2021) mengabarkan bahwa pemerintah China melakukan protes kepada Indonesia dalam sebuah nota diplomatik yang ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Surat itu dengan tegas meminta Indonesia untuk menghentikan tindakan pengeboran di rig lepas pantai Natuna Utara. Tidak hanya itu, insiden yang melibatkan nelayan antarnegara pun kadang terjadi. Pada 24 Juli lalu, kapal berbendera Vietnam kedatangan tengah melakukan aksi penangkapan ikan secara ilegal dalam wilayah perairan Natuna Utara. Dalam insiden itu, TNI Angkatan Laut KRI Cut Nyak Dien-375 berhasil mengamankan awak kapal tersebut. Insiden penangkapan ilegal bukan kali pertamanya terjadi (Detik, 2022). Serangkaian aksi semacam itu telah berulang kali terjadi, yang melibatkan nelayan negara tetangga. Aksi di lapangan pun kian kerap diwarnai oleh aksi dramatis kejar-kejaran kapal pencuri ikan.

Dalam upaya mendukung tugas penjagaan keamanan laut Indonesia dibentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla). Pembentukan Bakamla dimulai pada awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pada 2014. Bakamla dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 dengan tugas pokok yakni melakukan patroli untuk keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Bakamla sebenarnya bukanlah lembaga yang baru, di mana cikal bakal lembaga ini sudah ada sejak 2005. Sebelum Bakamla, terdapat Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut). Pembentukan pada 2014 boleh dikata hanya mengubah nama dari lembaga tersebut (Kominfo, 2014). Meski begitu, Bakorkamla yang sebelumnya dibentuk memang dinilai kurang efektif dan tidak tegas dalam menindak berbagai pelanggaran yang terjadi utamanya menyangkut kasus ilegal fishing (Azis dkk, 2022). Terlepas dari itu, Bakamla memiliki tantangan yang cukup besar dalam menjaga keamanan dan kedaulatan Indonesia di wilayah perairan Indonesia terutama Natuna Utara. Dibutuhkan strategi yang baik dalam mengatasi masalah-masalah sengketa atau tindakan pencurian yang dapat mengganggu kedaulatan dan keamanan Indonesia di wilayah tersebut.

Beberapa peneliti telah mengkaji topik terkait strategi Bakamla dalam perannya sebagai penjaga laut Indonesia. Meski demikian, jarang yang membahas secara spesifik pada wilayah Natuna utara. Salah satu peneliti yang telah membahasnya adalah Palar, Prakoso dan Aries (2021) yang berjudul "Strategi Pertahanan Laut Badan Keamanan Laut RI dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia". Penelitiannya lebih menekankan tugas Bakamla dalam upaya mencapai poros maritim dunia. Penelitian itu menyoroti tumpang tindih tugas pada instansi lain seperti TNI AL di perairan Indonesia. Menurutnya, Bakamla seharusnya dijadikan sebagai satu-satunya lembaga koordinator dalam keselamatan dan keamanan laut. Penelitian lainnya dilakukan oleh Adiprayoga, Octavian, dan Apriyanto (2020) berjudul "Efektivitas Peran Bakamla dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai *Coast Guard* Indonesia". Penelitian ini lebih menitikberatkan pembahasan mengenai peran Bakamla sebagai *coast guard* Indonesia. Berbeda dengan penelitian Palar, Prakoso dan Aries (2021) sebelumnya, penelitian ini lebih mengamini pada pembagian tugas antara Bakamla dengan instansi lainnya dalam mengamankan wilayah laut Indonesia, alih-alih menjadikannya lembaga satu-satunya dalam hal tersebut. Meski kedua penelitian itu menjadikan Bakamla sebagai kajian utamanya, tetapi sejauh ini belum ada yang membahas mengenai strategi Bakamla di Natuna Utara. Olehnya itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan itu dan menjadi kajian yang berkontribusi dalam ilmu pengetahuan.

Konsep Keamanan Maritim

Dibutuhkan sebuah konsep sebagai pisau analisis untuk mengkaji topik ini lebih jauh. Dalam hal ini, yang digunakan adalah konsep keamanan maritim (*maritime security*).

Menurut Keliat (2009), keamanan maritim adalah sebuah konsep yang baru terbentuk di awal abad ke-21 ini, dan merupakan konsep yang sifatnya tidak berdiri sendiri. Konsep ini berangkat dari kerangka pemikiran keamanan tradisional dan non-tradisional yang dikemukakan Barry Buzan. Keamanan tradisional memusatkan aktor keamanan pada negara di mana segala jenis ancaman muncul dan dilakukan oleh negara melalui militer. Karena demikian konsep keamanan ini berarti terbebasnya sebuah negara dari ancaman militer negara lain (Azizah, 2020). Sementara, keamanan tradisional didefinisikan secara lebih luas lagi. Buzan mengemukakan bahwa aktor keamanan terus mengalami perkembangan di mana tidak lagi hanya didominasi oleh negara, melainkan juga dari berbagai aktor non-negara lainnya. Selain itu, ancaman juga tidak hanya muncul dari luar negeri tetapi dari dalam negeri juga demikian (Azizah, 2020).

Kebanyakan literatur saat ini pada dasarnya melihat keamanan laut sebagai sebuah konsep yang berfokus pada karakteristik dan kegunaan laut, serta ancaman yang ditimbulkan dari kedua hal tersebut (Rahman, 2009). Menurut Forum Maritim ASEAN, keamanan maritim bisa dilihat dari lima elemen, yakni (1) pembajakan; (2) perampokan bersenjata; (3) lingkungan kelautan; (4) penangkapan ikan ilegal; (5) penyelundupan barang, manusia, senjata, dan narkoba dan obat terlarang (Keliat, 2009).

Sementara itu, Bueger (2015) melihat konsep ini dari The Matrix Framework yang ia kemukakan. Menurutnya, konsep keamanan maritim tidak lepas dari empat hal utama yaitu keamanan nasional (*national security*), lingkungan laut (*marine environment*), pertumbuhan ekonomi (*economic development*), dan keamanan manusia (*human security*). Dari segi keamanan nasional, keamanan maritim memiliki keterkaitan dengan perang di lautan. Dalam hal ini, negara harus memiliki kapasitas untuk melindungi kedaulatan melalui aksi militer. Sementara itu, dalam hal lingkungan laut, dilihat sebagai upaya bagi kapal dan aktor yang terlibat dalam bidang maritim untuk memberikan perlindungan terhadap ancaman kerusakan lingkungan laut seperti polusi dan perubahan iklim. Selain itu, fungsi laut juga tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi mengingat laut merupakan transportasi dominan dalam bidang perdagangan internasional. Dan dalam elemen yang ke-empat yang tidak kalah pentingnya yakni keamanan manusia, yang lebih fokus pada masalah sandang, pangan, dan papan. Laut dilihat sebagai penyedia makanan dan pekerjaan bagi masyarakat, tetapi tidak adanya regulasi membuat laut rawan akan tindak kejahatan yang dapat membahayakan manusia (Bueger, 2015).

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang memaparkan dan menganalisis strategi apa saja yang digunakan Bakamla dalam menjaga kedaulatan dan keamanan Indonesia di Laut Natuna Utara melalui analisis beberapa variabel yang dipaparkan dengan teori/konsep. Data diperoleh dari sumber sekunder atau yang tidak diambil secara langsung. Pada umumnya, data semacam ini diambil melalui studi pustaka, baik dari buku, dokumen/laporan resmi, artikel ilmiah, artikel daring, dan berbagai literatur lainnya yang memiliki hubungan dengan kasus yang hendak dipecahkan (Nazir, 2003). Sementara metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif di mana data direduksi dan dipertajam sesuai dengan fokus penelitian, yang kemudian disusun untuk mendapatkan kesimpulan di akhir tulisan (Silalahi, 2009).

Hasil dan Pembahasan

Keamanan merupakan masalah yang menjadi perhatian utama bagi setiap negara. Tidak adanya ancaman dari musuh negara lain menjadi keinginan tertinggi yang hendak dicapai. Bakamla sebagai sebuah entitas keamanan mempunyai peranan penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan teritori Indonesia. Wilayah Indonesia di Laut Natuna

Utara menjadi salah satu yang sangat rentan terjadi berbagai kejahatan, baik pelanggaran perbatasan oleh militer asing, *illegal fishing*, pembajakan, maupun berbagai pelanggaran lainnya yang kemudian mendorong upaya Bakamla untuk aktif.

Bakamla memiliki fungsi umum yakni menyelenggarakan sistem pertahanan nasional. Hal ini sejalan dengan tugas utama Bakamla yaitu untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia (Bakamla, n.d). Di wilayah Laut Natuna Utara pada khususnya, tugas Bakamla tidak mudah, sebab Bakamla seringkali berhadapan langsung dengan pihak yang melakukan pelanggaran dari pihak asing di wilayah laut Indonesia. Bakamla menjadi garda terdepan untuk mengamankan wilayah laut Indonesia baik dari ancaman aktor tradisional maupun non tradisional.

Secara tradisional, Bakamla seringkali berhadapan-hadapan secara langsung dengan *coast guard* dan militer China yang mengklaim Laut Natuna Utara sebagai wilayahnya. Sementara secara non-tradisional, Bakamla menjadi pihak keamanan yang berusaha menjaga wilayah laut itu aman dari aktifitas teroris, pembajakan, dan *illegal fishing*. Hadirnya berbagai potensi kejahatan di Laut Natuna Utara menuntut Bakamla untuk menerapkan berbagai strategi untuk mengoptimalkan perannya sebagai penjaga keamanan laut Indonesia. Beberapa strategi yang dimaksud dijelaskan pada poin-poin berikut.

1. Peningkatan Kapasitas SDM dan Peralatan Bakamla

Dalam melaksanakan tugasnya, Bakamla harus didukung oleh dua elemen pokok agar dapat berjalan dengan maksimal. Dua hal tersebut yakni kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan sistem sarana dan prasarana yang mumpuni. SDM di sini berarti dari pasukan yang ikut berpartisipasi keseluruhan dalam lembaga dan terutama upaya penjagaan laut Indonesia.

Menurut Srivastava (2016), manajemen SDM merupakan hal yang pokok dalam militer, karena prajurit menjadi elemen utama dan pihak yang berpartisipasi langsung sebagai aktor keamanan. SDM harus terdiri dari berbagai pihak yang mumpuni dan mampu menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Demikian juga dengan pimpinan SDM yang harus memiliki keterampilan profesional dan khusus untuk memenuhi tantangan ini dan mengelola program yang terdiri dari fungsi dan mengintegrasikan sistem model siklus hidup SDM.

Saat ini manajemen SDM Bakamla berada di bawah naungan presiden melalui Kementerian Politik, Hukum, dan HAM (Kemenkopolhukam). Sejak perubahan dari Bakorkamla menjadi Bakamla pada 2014, tidak ada perubahan secara signifikan dalam hal kepemimpinan. Hanya saja, lembaga ini mengalami perubahan di bagian pimpinan di mana sebelumnya di kantor zona dipimpin oleh Kolonel, meningkat menjadi bintang 1 (Hasbullah, Ali, & Susanto, 2021). Selain itu, staf Bakamla juga merupakan bagian dari *stake holder* Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya yang sifatnya penugasan. Banyak yang berasal dari instansi lain seperti TNI-AL dan ASN lainnya dengan latar pendidikan, instansi, dan keahlian yang berbeda-beda (Hasbullah, Ali and Susanto, 2021).

Dalam meningkatkan kemampuannya, Bakamla melakukan serangkaian pelatihan guna memperkuat keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Bakamla 2020-2024, pada tahun 2015-2019 jumlah personel Bakamla yang ikut dalam kegiatan pelatihan adalah sebanyak 1556 orang (Bakamla, 2020). Angka ini terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

Pada 2021, Bakamla juga resmi membuka 372 formasi dalam tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guna meningkatkan SDM di dalam tubuh lembaga itu. SDM yang dibutuhkan akan mengisi berbagai bidang yang menunjang kebutuhan Bakamla di empat wilayah, yakni Komando Pusat dan tiga zona lainnya, terutama Laut Natuna Utara (Liputan6, 2021). Kantor zona Bakamla dibagi menjadi 3 yakni zona barat yang berada di Batam Kepulauan Riau, zona tengah bertempat di Manado, dan zona timur di Ambon. Laut Natuna Utara masuk dalam zona barat.

Kawasan zona barat, lautan natuna utara, menjadi salah satu kawasan yang paling aktif melakukan latihan. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya ketegangan di kawasan itu usai adanya tumpang tindih klaim wilayah antara China dan negara-negara ASEAN yang

turut berdampak pada klaim Natuna Utara. Pada Desember 2021, kepala Bakamla, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, menjadikan wilayah Natuna Utara sebagai bagian dari wilayah keamanan perairan prioritas. Ia menekankan pentingnya peran Bakamla sebagai lembaga yang diamanatkan Presiden Joko Widodo sebagai *Coast Guard* Indonesia, di mana dia berharap bahwa SDM-nya mampu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan jasmani layaknya prajurit militer lainnya (Merdeka.com, 2021).

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah sarana dan prasarana yang terdiri dari peralatan militer mencakup kapal, senjata, dan alat pertahanan lainnya. Bakamla dalam tugasnya memerlukan kapal patroli untuk menindak berbagai pelanggaran yang terjadi di wilayah yurisdiksi Indonesia. Kendati saat ini sudah ada alat yang dikenal dengan AIS (*Automatic Identification System*) yang dapat mengidentifikasi pelanggaran hukum dari jarak jauh, namun tetap saja dibutuhkan pihak yang siap untuk menindak para pelanggar di lapangan, yang dalam hal ini adalah Bakamla (Lathif & Suhirwan, 2021; Apriyanto, 2022). Tidak hanya itu, keberadaan kapal patroli juga dapat menjadi alat yang digunakan untuk tindakan pencegahan dan memberikan efek gentar (*deterrent*) terhadap para pelanggar hukum (Apriyanto, 2022).

Akan tetapi, ketika ketegangan antara kapal-kapal asing China dan Vietnam secara ilegal memasuki wilayah ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara pada pertengahan 2021 lalu, Sekretaris Utama Bakamla, Laksamana Madya S. Irawan, secara terbuka mengakui kekurangan kapal dalam melakukan patroli. Bakamla saat itu memang hanya memiliki 10 kapal besar dan kurang lebih 20 kapal kecil yang tersedia, dan sangat tidak cukup untuk digunakan dalam upaya penjagaan wilayah perairan Indonesia di tiga zona utama. Padahal Idealnya, Bakamla harus memiliki setidaknya 77 kapal agar dapat memaksimalkan tugasnya sebagai penjaga keamanan perairan (Media Indonesia, 2021; VOA Indonesia, 2021). Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengakui hal itu di mana sarana dan prasarana Bakamla sangat kurang. Bahkan anggaran Bakamla untuk tahun itu saja hanya sebesar 400 miliar rupiah (VOA Indonesia, 2021). Anggaran Bakamla sejak sejak tahun 2017 berjumlah 720.6 miliar dan terus mengalami penurunan yang bahkan sejak saat itu tidak pernah mencapai angka 800 miliar (DPR RI, 2022).

Melihat hal itu, pada akhir tahun 2022, Ketua Bakamla menghadiri rapat dengan Komisi I DPR RI guna membahas Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Bakamla RI di Tahun 2023. Bakamla mengusulkan kenaikan anggaran menjadi 834 miliar untuk upaya memaksimalkan peningkatan keamanan laut (Bakamla RI, 2022a). Kenaikan itu dilihat dengan adanya peningkatan pemenuhan kebutuhan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, yang saat ini telah diiringi dengan membaiknya tata kelola administrasi.

Sementara itu, sejak akhir tahun 2021, Bakamla juga telah melakukan pengadaan satu unit kapal patroli jenis High Speed Craft (HSC) di Kepulauan Riau. Kapal dengan Panjang hampir 15 meter dan lebar 3,3 meter itu kemudian menjadi tambahan unit untuk memperkuat keamanan zona maritim barat demi mengatasi berbagai bentuk ancaman penyelundupan (JPNN, 2021). Pada Maret 2022, Bakamla kembali membeli tipe yang sama yang akan memfokuskan untuk digunakan dalam melakukan kegiatan patroli di Laut Natuna Utara utamanya pada pelanggaran *illegal fishing* (Kompas.com, 2022).

Bakamla terus melakukan peningkatan guna menunjang upaya penjagaan laut Indonesia. Di tahun 2022 ini, Bakamla telah menyusun serangkaian konsep pelaksanaan tugas dan prioritas yang difokuskan pada wilayah Pantai Barat Sumatera, Laut Natuna Utara, dan wilayah Alur Laut Kepulauan I, II, dan III dengan penerapan armada siaga (Bakamla RI, 2022c). Dalam rangka mendukung Rencana Kerja Prioritas pada 2023, Bakamla juga telah mengupayakan beberapa proyek nasional seperti kegiatan prioritas keamanan laut dengan pembangunan pangkalan Sekotok, Operasi bidang keamanan, dan pengadaan sarana dan prasarana bidang pertahanan yakni meriam 30 mm (Bakamla RI, 2022a).

2. Perlibatan Instansi Lainnya

Menurut Beckley (2010), anggaran militer berjalan lurus dengan kemampuan militer sebuah negara. Pihak yang lebih maju secara ekonomi secara konsisten mengalahkan pihak yang lebih miskin. Konsepsi kekuatan militer yang memperhitungkan kuantitas sumber daya suatu negara dan tingkat perkembangan ekonominya memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan pertahanan. Sebagai perbandingan, kekuatan militer yang maju adalah pada negara Barat di mana dominasi militer konvensional berasal dari pembangunan ekonomi yang unggul, bukan patologi sosial atau institusi politiknya.

Jika menilik pada kasus Bakamla hal tersebut tidak begitu tercapai. Dari segi sarana dan prasarana, Bakamla boleh dikata sangat kekurangan. Anggaran yang minim dan pengadaan kapal seadanya membuat lembaga ini mau tidak mau harus bekerja sama dengan instansi lainnya. Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia dalam wawancaranya bersama CNN Indonesia (2015) mengungkapkan bahwa Bakamla memang masih kekurangan kapal. Menurutnya, seandainya saja Bakamla tidak mampu membeli kapal untuk menunjang kebutuhan di perairan Indonesia khususnya di Laut Natuna Utara dalam waktu dekat, maka ia harus mempertimbangkan opsi lainnya yakni mengadakan kerja sama dengan lembaga lain yang ranah kerjanya juga berada di sektor kelautan.

Dalam sektor penjagaan laut Indonesia saat ini memang ada banyak instansi yang terlibat selain Bakamla. Lembaga tersebut yakni TNI AL, Polisi Air (Polair), Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia (KPLP), dan Dirjen Bea dan Cukai. Masing-masing dari lembaga tersebut melaksanakan tugasnya di bawah setiap kementerian yang berbeda. Hal ini juga seringkali dipermasalahkan karena mereka dianggap melakukan tugas yang saling tumpang tindih dengan Bakamla dan TNI AL (Palar, Prakoso, & Sutanto, 2021).

TNI AL pada dasarnya merupakan lembaga terdepan untuk pertahanan dan keamanan negara. Sayangnya, TNI AL menurut hukum internasional hanya diperbolehkan untuk berlayar di zona teritorial dan tidak dengan ZEE. Di sini lah seharusnya peran Bakamla. Bbadan ini kemudian diposisikan sebagai komponen cadangan (Komcad) dalam pertahanan dan keamanan maritim guna memperkuat posisi TNI AL (Palar, Prakoso, & Sutanto, 2021). Meski begitu, Bakamla sebagai Komcad juga telah memenuhi standar internasional untuk meningkatkan kapasitas alutsistanya.

Dalam bentuk kerja samanya dengan TNI AL, Bakamla seringkali melakukan operasi dan latihan bersama. Sinergitas keduanya dilakukan dengan melakukan kerja sama satu sama lain. Di satu sisi, Bakamla tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan penyelesaian masalah di laut, tetapi mereka ditugaskan untuk menghentikan dan menangkap para pelanggar yang kemudian setelahnya kewenangan untuk menindak secara hukum akan dilanjutkan oleh pihak TNI AL berdasarkan permintaan dari Bakamla. (Ansori, Ikhsanudin and Suhardono, 2017). Sebagai ujung tombak pertahanan dan keamanan laut Indonesia, keduanya aktif melakukan pertukaran informasi satu sama lain.

Pada Maret 2022, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dan menjadikan Bakamla sebagai koordinator bidang keamanan laut. Dengan ditekenya PP itu kemudian melegitimasi peran Bakamla sebagai penjaga keamanan laut dengan melakukan berbagai upaya, seperti pemeriksaan kapal dan pulau. Bakamla dalam PP itu juga diharuskan untuk melakukan patroli serta latihan dengan instansi lainnya baik dalam maupun luar negeri guna meningkatkan kemampuan personel.

Salah satu insiden yang memperlihatkan kerja sama antara Bakamla dengan TNI AL yakni pada awal 2021 lalu. Saat itu, kapal pengawas perikanan Vietnam Kiem Ngu 215 masuk di yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara (Bakamla RI, 2021). Tidak hanya itu, yang terbaru pada Agustus 2022 lalu, Bakamla untuk pertama kalinya sejak PP nomor 13 diteken, mengadakan patroli bersama dengan instansi lainnya yakni Polair, PSDKP, KPLP, Bea Cukai, dan TNI AL. Fokus utama kegiatan patroli bersama itu adalah pada wilayah Laut Natuna Utara, Selat Malaka, dan Laut Sulawesi. Dalam operasi itu juga, Bakamla mengerahkan 7 Kapal Negara (KN) dilengkapi dengan senjata meriam 30 mm, senjata mesin berat 12,7 mm,

serta senjata ringan personel DSAR-15 kaliber 5.56. Tidak hanya Bakamla, instansi lainnya turut mengerahkan aset-aset persenjataannya (Bakamla RI, 2022b).

Di ranah internasional, Bakamla melakukan serangkaian kerja sama dalam bentuk latihan dengan militer atau *coast guard* negara lain. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk manifestasi dari PP Nomor 13 tahun 2022 di mana Bakamla diharuskan untuk melakukan latihan dengan negara lain.

Selain itu, kerja sama internasional antara Bakamla dengan *coast guard* asing ini juga menjadi salah satu bentuk dari kerja sama keamanan lintas negara. Hal ini sejalan dengan konsep kerja sama keamanan yang dikemukakan oleh Harald Muller dalam (Carlsnaes, Risse and Simmons, 2018) bahwa ketika ketegangan antarnegara muncul, ketergantungan untuk kerja sama dengan pihak lainnya yang juga tinggi. Dalam hal ini, ketika ketegangan antara Indonesia dan China meningkat, maka Amerika Serikat hadir sebagai pihak ketiga untuk bekerja sama dengan Indonesia melawan hegemoni China.

Pada September 2021 lalu misalnya, ketika tensi di Laut Natuna Utara meningkat, Bakamla mengadakan serangkaian operasi dan latihan bersama dengan Penjaga Pantai AS kapal USGC Munro di Selat Singapura. Latihan itu fokus pada komunikasi antarkapal, manuver multi-unit, dan kesadaran maritim (Berita Satu, 2021).

Meskipun anarki internasional membuat negara-negara sulit untuk bekerja sama karena adanya dilema keamanan (*security dilemma*), tetapi dalam situasi yang memuncak hal itu seringkali diabaikan. Lebih banyak keuntungan yang diperoleh jika bekerja sama dan ketakutan akan konsekuensi pembelotan pihak lain akan menjadi lebih sedikit (Jervis, 1985).

Kegiatan Bakamla untuk melakukan latihan dan patroli bersama dengan instansi lainnya bukan hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan personel semata, melainkan juga mampu memperkuat keamanan laut dengan alutsista dari instansi lain. Sebagai contoh ketika Bakamla mengadakan patroli bersama dengan TNI AL di Laut Natuna Utara, maka sudah pasti TNI AL juga akan melibatkan alusistanya dalam kegiatan patroli itu. Langkah itu sekaligus melengkapi kemampuan Bakamla yang dianggap masih kekurangan kapal dan persenjataan (Rohana, 2022). Instansi lain juga perlu mengetahui bahwa Bakamla merupakan ujung tombak keamanan laut Indonesia di Laut Natuna Utara, sehingga dibutuhkan sinergi antarlembaga untuk saling menguatkan satu dengan yang lain baik dalam hal SDM maupun alutsista.

3. Pengerahan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung

Menurut kerangka pemikiran keamanan non-tradisional Buzan dan Hansen, aktor keamanan tidak lagi hanya didominasi oleh aktor negara-militer semata, tetapi juga dapat oleh individu yang bekerja sama maupun organisasi (Azizah, 2020). Demikian juga dalam upaya penjagaan keamanan laut, di mana keamanan saat ini dipadukan dengan melibatkan kekuatan masyarakat sipil di dalamnya.

Salah satu strategi yang dilakukan Bakamla dalam menghalau klaim China di Laut Natuna Utara adalah dengan menempatkan nelayan-nelayan lokal di wilayah itu untuk beraktifitas. Jika merujuk pada aturan konstitusi negara, langkah semacam ini juga sebenarnya sudah sejak lama diatur dalam UUD 1945 pasal 30 (1) yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Yosarie, 2021). Hanya saja, pengerahan ini bersifat terlalu dipaksakan. Bakamla dalam hal ini berupaya memanfaatkan para nelayan untuk menjadi pengawas di lautan.

Konsep ini telah ditawarkan oleh Kepala Bakamla. Dalam sebuah pemberitaan Tempo.co (2021) Kepala Bakamla Aan Kurnia mengatakan perlunya masyarakat Indonesia untuk mengeksplorasi kekayaan alam di Laut Natuna Utara yang dipersengketakan. Alih-alih mengklaim saja, nelayan lokal sudah seharusnya dikerahkan ke wilayah ini untuk mengeksploitasi kekayaan perikananannya. Tetapi langkah itu seolah terhambat oleh beberapa hal. Umumnya, nelayan yang dikerahkan oleh Kemenkopolkum adalah nelayan yang berasal dari Pantai Utara pulau Jawa. Tetapi langkah itu mendapat penentangan kuat dari nelayan lokal di Natuna karena menyaingi posisi mereka (Wijaksono, Suwarno and Supryadi, 2021). Namun demikian, konsep yang ditawarkan oleh Bakamla sangat kompleks. Lembaga itu mengusulkan pembentukan Komponen Cadangan yang berbasis pada nelayan-nelayan

lokal. Dalam hal ini, mereka akan mengawal beberapa wilayah laut yang bergejolak seperti Laut Natuna Utara.

Para nelayan ini akan dinamai dengan NNI (Nelayan Nasional Indonesia) dengan tugas utama yakni melakukan pemantauan, mengumpulkan informasi, sambil mencari ikan, dan digaji oleh negara sebagai bagian dari Komcad (CNN Indonesia, 2022). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Terpstra (2009) bahwa peran warga negara dalam keamanan berkonsentrasi pada memberikan informasi, menasihati dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan. NNI akan diberikan pelatihan bela negara dan nasionalisme untuk meningkatkan kewaspadaan maritim. Untuk mendukung keterlibatan nelayan dalam memberikan informasi, maka mereka akan dibekali dengan alat komunikasi yang lebih baik.

Langkah untuk memanfaatkan nelayan sebelumnya telah dilakukan oleh China terlebih dahulu. Beijing membentuk Milisi Maritim dari jaringan nelayan luas yang dilatih dan dilengkapi dengan peralatan yang mumpuni untuk membantu Angkatan Lautnya di Laut China Selatan. Mereka secara tidak langsung disertakan dalam upaya penegak hukum dan kemudian dikenal dengan *The Hybrid Civilian-Naval Forces* (Kraska and Monti, 2015).

Selain itu, Bakamla juga membentuk Relawan Penjaga Laut Nusantara (Rapala). Menurut Peraturan Bakamla nomor 13 tahun 2021, Rapala merupakan kelompok masyarakat yang secara sukarela menjaga keamanan, keselamatan dan perlindungan lingkungan laut di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Relawan ini merupakan kelompok yang dikembangkan oleh Bakamla yang bertugas untuk membantu melaksanakan pengawasan, keselamatan, dan perlindungan di laut untuk membantu peran Bakamla. Wilayah kerja Rapala berada di sekitar lokasi kerja Bakamla dan di zona utama di setiap daerah. Meski memiliki hak khusus, Rapala tidak serta merta mendapat kewenangan untuk melakukan penegakkan hukum di lautan. Langkah penegakkan hukum akan dikembalikan kepada Bakamla dan instansi terkait.

Di wilayah yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara, Rapala melaksanakan kewajibannya sebagai komponen cadangan. Mereka akan memantau aktivitas kapal asing yang terbukti melanggar dan kemudian dikoordinasikan dengan pihak Bakamla. Perlibatan nelayan lokal dalam hal keamanan laut sudah pasti menjadi sebuah langkah positif atas upaya yang dikerahkan Bakamla dalam penjagaan laut Indonesia. Bagaimanapun, upaya ini merupakan suatu kemajuan. Namun efektifitas strategi yang diambil akan dilihat dari pencapaian positif di Laut Natuna Utara dengan tingkat kehadiran kapal asing di wilayah tersebut.

Kesimpulan

Bakamla sebagai satuan utama yang mengkoordinir penjagaan laut Indonesia terkhusus di Laut Natuna Utara memiliki tiga strategi utama dalam mencegah terjadinya berbagai pelanggaran di wilayah tersebut. Pertama, Bakamla berupaya meningkatkan kapasitas SDM dan peralatannya. Dalam hal ini, Bakamla rutin melakukan pelatihan dan menambah SDM-nya melalui tes CPNS. Badan ini juga berupaya meningkatkan anggaran militernya melalui pemerintah dengan permintaan anggaran di atas 800 miliar rupiah menjelang akhir tahun 2022. Selain itu, dalam kapasitas peralatan, Bakamla menambah armada patroli lautnya dengan dua unit kapal jenis High Speed Craft (HSC) pada 2021-2022 yang fokus beroperasi di sekitar Laut Natuna Utara. Kedua, Bakamla berupaya melibatkan instansi lainnya dalam beberapa operasi dan latihan guna menutupi kekurangan SDM maupun alutsista yang dimiliki oleh Bakamla. Kerja sama yang dimaksud terdiri dari kerja sama antar institusi dalam negeri yang dalam hal ini bersama dengan pihak yang juga terlibat dalam penegakkan hukum di wilayah laut TNI AL, Polair, PSDKP, KPLP, dan Bea Cukai di Laut Natuna Utara. Ketiga, mengerahkan partisipasi masyarakat secara langsung melalui usulan pembentukan Nelayan Nasional Indonesia yang akan membantu Bakamla memberikan informasi di natuna utara. Selain itu dibentuk pula Relawan Penjaga Laut dari kalangan masyarakat lokal yang bertugas menjaga keselamatan dan melakukan pengawasan di laut natuna utara dengan secara sukarela. Tiga strategi utama Bakamla ini diterapkan secara sistematis oleh Bakamla guna mencapai keamanan di wilayah Laut Natuna Utara. Keamanan

dan keselamatan di wilayah itu bagaimanapun menjadi isu prioritas utama mengingat wilayah Natuna Utara merupakan wilayah Indonesia yang sangat potensial. Karenanya, pemerintah harus memberikan dukungan serius atas upaya yang dikerahkan oleh Bakamla.

Daftar Pustaka

- Adiprayoga, S. N., Octavian, A. and Apriyanto, N. P. (2020) 'EFEKTIVITAS PERAN BAKAMLA DALAM MENJALANKAN FUNGSIONYA SEBAGAI COAST GUARD INDONESIA', 6, pp. 182–202.
- Ansori, Ikhsanudin, A. H. and Suhardono, E. (2017) 'Sinergi Bakamla dengan TNI AL guna Penanggulangan Tindak Pidana di Laut dalam Rangka Penegakan Hukum', *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut*, pp. 47–68.
- Apriyanto, I. N. P. (2022) 'ANALISIS PERANAN DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAKAMLA RI DALAM PENGADAAN KAPAL PATROLI MELALUI MODEL TRIPLE HELIX ANALYSIS OF DIRECTORATE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT' S ROLE AT PATROL VESSEL PROCUREMENT BY TRIPLE HELIX MODEL *Jurnal Lembaga Keta'*, pp. 39–50.
- Azizah, Z. H. (2020) 'Mendefinisikan Kembali Konsep Keamanan dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa (Redefining the Concept of Security in the Nation-State Policy Agenda)', *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6(3), pp. 94–104.
- Bakamla RI (2021) *Sinergi pengamanan Laut Natuna, TNI AL dan Bakamla laksanakan latihan bersama*. Available at: https://bakamla.go.id/publication/detail_news/sinergi-pengamanan-laut-natuna-tni-al-dan-bakamla-laksanakan-latihan-bersama.
- Bakamla RI (2022a) *Bahas penyesuaian RKA-KL, Kepala Bakamla RI rapat dengan Komisi I DPR RI*. Available at: https://bakamla.go.id/publication/detail_news/bahas-penyediaan-rka-kl-kepala-bakamla-ri-rapat-dengan-komisi-i-dpr-ri.
- Bakamla RI (2022b) *Kepala Bakamla RI Resmi Buka Patroli Bersama Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional 2022*. Available at: https://bakamla.go.id/publication/detail_news/kepala-bakamla-ri-resmi-buka-patroli-bersama-keamanan-dan-keselamatan-laut-nasional-2022.
- Bakamla RI (2022c) *PRESS CONFERENCE AKHIR TAHUN KEPALA BAKAMLA RI: "MENJAGA LAUT NUSANTARA UNTUK MASA DEPAN BANGSA"*. Available at: https://bakamla.go.id/publication/detail_news/press-conference-akhir-tahun-kepala-bakamla-ri-menjaga-laut-nusantara-untuk-masa-depan-bangsa.
- Beckley, M. (2010) 'Economic Development and Military Effectiveness', *Journal of Strategic Studies*, 33(1), pp. 43–79. doi: 10.1080/01402391003603581.
- Berita Satu (2021) *Kapal Penjaga Pantai AS Ikuti Latihan Bersama Bakamla di Selat Singapura*. Available at: <https://www.beritasatu.com/news/831355/kapal-penjaga-pantai-as-ikuti-latihan-bersama-bakamla-di-selat-singapura>.
- Bisnis.com (2020) *Kekayaan Laut Indonesia Hampir Rp20.000 Triliun, KKP Beri Penjelasan*. Available at: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220729/99/1560541/kekayaan-laut-indonesia-hampir-rp20000-triliun-kkp-beri-penjelasan>.
- Bueger, C. (2015) 'What is maritime security?', *Marine Policy*, 53, pp. 159–164. doi: 10.1016/j.marpol.2014.12.005.
- Carlsnaes, W., Risse, T. and Simmons, B. (2018) *Handbook of International Relations*. second edi, *Visual Global Politics*. second edi. SAGE Publication. doi: 10.4324/9781315856506.
- CNN Indonesia (2015) *Pengamat Sangsi Kebijakan Australia ke Indonesia Berubah*. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150916164929-113-79188/pengamat-sangsi-kebijakan-australia-ke-indonesia-berubah>.
- CNN Indonesia (2022) *Pakar Ungkap Pengerahan Milisi Nelayan Bisa Imbangi China di Natuna*. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220209155558->

- 12-757093/pakar-ungkap-pengerahan-milisi-nelayan-bisa-imbangi-china-dinatuna.
- DPR RI (2022) 'Anggaran Belanja Bakamla RI Periode 2017-2022 Turun Tajam'. Available at: <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/infografis/public-file/infografis-public-113.pdf>.
- Hasbullah, M. I., Ali, Y. and Susanto (2021) 'Analisis manajemen sumber daya manusia Bakamla Batam dalam menjaga kedaulatan di Selat Malaka', *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(2), pp. 20–38. Available at: <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/MP/article/view/803>.
- Jervis, R. (1985) 'From Balance to Concert: A Study of International Security Cooperation', *World Politics*, 38(1), pp. 58–79. doi: 10.2307/2010351.
- JPNN (2021) *Kehadiran Kapal Terbaru Bakamla Ini Bikin Ciut Nyali Penjahat di Laut*. Available at: <https://m.jpnn.com/news/kehadiran-kapal-terbaru-bakamla-ini-bikin-ciut-nyali-penjahat-di-laut>.
- Keliat, M. (2009) 'Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(Juli), p. 19.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (2020) *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*. Available at: <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (2022) *Wujudkan Ekonomi Biru Melalui Alat Penangkapan Ikan (Api) Ramah Lingkungan di Kabupaten Natuna*. <https://kkp.go.id/artikel/39960-api-ramah-lingkungan>
- Kompas.com (2022) *Bakamla Bakal Tambah Kapal Patroli HSC Baru di 2022*. Available at: [https://nasional.kompas.com/read/2022/03/07/12313721/bakamla-bakal-tambah-kapal-patroli-hsc-baru-di-2022#:~:text=Sebagai informasi%2C Bakamla pada 2021,dan mampu mengakomodasi enam orang](https://nasional.kompas.com/read/2022/03/07/12313721/bakamla-bakal-tambah-kapal-patroli-hsc-baru-di-2022#:~:text=Sebagai%20informasi%20Bakamla%20pada%202021,dan%20mampu%20mengakomodasi%20enam%20orang).
- Kraska, J. and Monti, M. (2015) 'The Law of Naval Warfare and China's Maritime Militia', 91. Liputan6 (2021) *Bakamla Buka Seleksi CPNS 2021, Ada 372 Formasi Tersedia*. Available at: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4612837/bakamla-buka-seleksi-cpns-2021-ada-372-formasi-tersedia>.
- Media Indonesia (2021) *Kekuatan Penjaga 2/3 Wilayah Indonesia Jauh dari Ideal*. Available at: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/417770/kekuatan-penjaga-23-wilayah-indonesia-jauh-dari-ideal>.
- Merdeka.com (2021) *Bakamla Prioritaskan Pengamanan Perairan Natuna pada 2022*. Available at: <https://www.merdeka.com/peristiwa/bakamla-prioritaskan-pengamanan-perairan-natuna-pada-2022.html>.
- Miranda, A. S. (2018) 'Pelanggaran Terhadap Hak Berdaulat Indonesia: Studi Kasus Tiongkok di Laut Natuna Utara', *Journal of International Relations*, 4(4), pp. 868–877.
- Nazir, M. (2003) *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Palar, A. M. K., Prakoso, L. Y. and Aries, S. (2021) 'Strategi Pertahanan Laut Badan Keamanan Laut RI dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia', *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 7(2), pp. 143–158.
- Rahman, C. (2009) 'Centre for Strategic Studies: New Zealand Concepts of Maritime Security A strategic perspective on alternative visions for good order and security at sea, with policy implications for New Zealand', *The Centre for Strategic Studies: New Zealand, Discussion Papers*, (07). Available at: <http://www.vuw.ac.nz/css/>.
- Reuters (2021) *EXCLUSIVE China protested Indonesian drilling, military exercises*. Available at: <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-china-protested-indonesian-drilling-military-exercises-2021-12-01/>.
- Rohana, U. (2022) 'Interoperabilitas TNI AL dan Bakamla RI dalam Melaksanakan Kegiatan Pengawasan terhadap Pelanggaran di Wilayah Laut Natuna Utara', *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(4), pp. 261–267. doi: 10.7777/jiemar.v3i4.
- Silalahi, U. (2009) *Metode penelitian sosial*. Edited by A. Gunarsa. Bandung: Refika Aditama.

- Srivastava, R. (2016) *Significance of Human Resource Management in Military*. Available at: <https://www.peoplematters.in/article/hcm-hrms-hris/significance-of-human-resource-management-in-military-14687>.
- Tempo.co (2021) *Ini 3 Strategi Kepala Bakamla Jaga Perbatasan di Laut Natuna*.
- Terpstra, J. (2009) 'Citizen Involvement in Local Security Networks', *Security Journal*, 22(2), pp. 156–169. doi: 10.1057/palgrave.sj.8350079.
- VOA Indonesia (2021) *Komisi I DPR: Bakamla 'Kedodoran' Jaga Perbatasan Laut*. Available at: <https://www.voaindonesia.com/a/komisi-i-dpr-bakamla-kedodoran-jaga-perbatasan-laut15-september-2021/6229601.html>.
- Wijaksono, M. M., Suwarno, P. and Supryadi (2021) 'Evaluasi Strategi Kelautan Republik Indonesia Dalam Pengerahan Nelayan Pantura Di Laut Natuna', *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), pp. 219–226.
- Yosarie, I. (2021) *MASALAH PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PERTAHANAN*, *Institute for Democracy and Peace*. Available at: <https://setara-institute.org/masalah-pelibatan-masyarakat-dalam-pertahanan/>.